



**REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK**

**KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RUU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2023  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI**

---

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sehat, Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu, Namu Buddhaya. Salam Kebajikan.**

**Yang kami hormati, Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta hadirin yang berbahagia**

1. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda "**Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023**", yang selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN.
2. APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya **APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel**

agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan. **APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel**, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan **penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023**, yaitu berupa **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023**.

3. Pada kesempatan ini, **kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi** melaksanakan APBN TA 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan, khususnya kepada DPR dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, pada periode sebelumnya, saat ini, maupun di masa yang akan datang.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

4. Sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir, APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Upaya meningkatkan **infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan**

**masyarakat** telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan **penambahan Jalan Tol sepanjang 1.938 km dan Jalan Nasional non-Tol sepanjang 4.574 km**. APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, telah didukung dengan **pembangunan 37 bendungan**, serta **peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatts**.

5. APBN juga berfungsi penting dalam peningkatan kualitas SDM dengan membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap **peningkatan partisipasi kasar** dari seluruh jenjang pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan Dana Abadi Pendidikan telah memberikan **Beasiswa LPDP kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa**, sehingga mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun di luar negeri.
6. Melalui Anggaran di bidang Kesehatan, APBN telah mampu menunjang Kemajuan pada sektor kesehatan seperti **menurunkan angka prevalensi *stunting* dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 21,5 persen di tahun 2023**. APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui **penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi single digit 9,36 persen di tahun 2023**. Kemiskinan ekstrem juga telah menurun signifikan dari **6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen di tahun 2023**.
7. APBN menjadi **instrumen pembiayaan penting** dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan dan *event* internasional secara sangat sukses seperti Asian Games, Asian Paragames, dan IMF-World

Bank Group Annual Meetings pada tahun 2018, Kegiatan Presidensi G20 pada tahun 2022, Piala Dunia U-17, rangkaian kegiatan keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023.

8. Capaian kemajuan ini adalah sebagian dari berbagai capaian yang telah kita raih bersama dalam sepuluh tahun masa Pemerintahan ini. **Tentunya capaian ini bukanlah hasil kerja Pemerintah semata**, namun juga merupakan hasil kerja bersama Bapak dan Ibu Anggota Dewan dalam mengawasi pelaksanaan APBN, serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengawal pembangunan. Kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan capaian pembangunan yang optimal untuk kemajuan bangsa dan negara.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

9. Sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting yang berfungsi sebagai alat **stabilisasi, distribusi, dan alokasi** - APBN selalu hadir dan diandalkan negara dalam menghadapi banyak guncangan dan ketidakpastian global dan domestik - seperti pandemi Covid-19 yang luar biasa berat dan dahsyat. **Pemerintah dan DPR terus bekerjasama secara baik** dalam merumuskan dan menentukan kebijakan fiskal (APBN) sehingga mampu merespons dan menjawab tantangan yang luar biasa tersebut.

10. Kondisi pandemi yang luar biasa (*extraordinary*) membutuhkan kebijakan APBN yang juga luar biasa, dimana penerimaan negara yang menurun tajam akibat berhentinya kegiatan ekonomi dan masyarakat, mengharuskan APBN mendanai belanja yang melonjak tinggi untuk menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian. Kebijakan APBN yang luar biasa ditunjukkan dengan besaran defisit 6,1% PDB jauh diatas batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara sebesar 3% PDB. Kondisi genting akibat Pandemi menyebabkan APBN bekerja luar biasa keras dalam periode 2020-2021; yang mampu memulihkan kembali ekonomi Indonesia dan sekaligus mampu mengembalikan kesehatan APBN. Konsolidasi fiskal dalam dua tahun (lebih cepat satu tahun dari perkiraan awal) termasuk tersingkat dibandingkan banyak negara baik di G20 maupun ASEAN telah menghasilkan defisit APBN turun dibawah 3% PDB pada tahun 2022. Perekonomian Indonesia kembali pulih dari kontraksi 2,07% di 2020 menjadi positif 3,7% di 2021 dan berlanjut tumbuh di 5,3% pada tahun 2022.
11. **Namun pasca meredanya pandemi Covid-19 tidak membuat perekonomian global serta merta menjadi pulih.** Tahun 2023 terjadi gejolak perekonomian global. APBN Tahun 2023 yang dirancang pada pertengahan tahun 2022 sangat diwarnai oleh perkembangan kondisi geopolitik global, khususnya perang Rusia – Ukraina. Gangguan rantai pasok global akibat perang telah menyebabkan volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi yang berkepanjangan di banyak negara sehingga mendorong kenaikan suku bunga acuan global dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan di sebagian besar negara berkembang.

12. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023, khususnya AS, Eropa dan Tiongkok. Berbagai analisis dan laporan lembaga internasional juga menunjukkan adanya tantangan berat yang akan dihadapi di tahun 2023, termasuk potensi krisis yang terjadi di sejumlah negara besar.
13. Menghadapi risiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, Pemerintah bersama DPR sepakat merancang **APBN TA 2023 secara hati-hati, waspada**, namun tetap **efektif dan optimistis** dalam menjaga momentum pertumbuhan. APBN 2023 kembali berperan sebagai *shock absorber* dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
14. Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN TA 2023 menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kredibilitas dan sustainability fiskal Indonesia terus terjaga.
15. Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti *resilient* dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023. Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5%, yakni 5,05%, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global.
16. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,5 persen). Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih

berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy).

17. Kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan trend peningkatan, rasio perpajakan dijaga di level *double digit* 10,31 persen PDB. Keseimbangan primer surplus 0,46 persen PDB, merupakan posisi surplus pertama kali sejak tahun 2012, defisit fiskal yang semakin terkendali di kisaran 1,62 persen PDB dan rasio utang secara bertahap didorong semakin menurun, di kisaran 39,2 persen PDB. Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut Pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, akselerasi infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi.
18. Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat di tahun 2023 juga semakin membaik, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen di tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.
19. Kondisi positif juga terlihat dari **Neraca Perdagangan Indonesia yang sampai Desember 2023 mencatatkan surplus berturut-turut selama 44 bulan**. Neraca Pembayaran Indonesia kembali surplus USD 6,3 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya surplus USD 4 miliar. Selain itu, dengan *Gross National Income* per kapita 2023 yang mencapai

USD4.580, Indonesia kembali masuk kategori *upper middle-income country* sebagai *milestone* penting bagi Visi Indonesia Emas 2045.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

20. Selanjutnya, **izinkan kami menyampaikan intisari RUU P2 APBN TA 2023.** Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. RUU P2 APBN diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023.

21. Sesuai ketentuan, **LKPP Tahun 2023 terdiri atas tujuh komponen laporan,** yaitu: (1) Laporan Realisasi APBN, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2023, tercermin dalam LKPP Tahun 2023.

**Ringkasan dari masing-masing laporan** tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

22. Dalam Laporan Realisasi APBN TA 2023 ditunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.783,9 triliun (105,56% dari target) atau tumbuh 5,62% dari 2022. Penerimaan Perpajakan Rp2.154,2 triliun (101,69% target), Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp612,5 triliun (118,75% target) dan Penerimaan Hibah Rp17,2 triliun. Pencapaian pendapatan negara yang baik tersebut utamanya dipengaruhi oleh penguatan pemulihan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas pada



tahun sebelumnya, dan implementasi UU HPP yang mampu meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak, serta peningkatan kualitas dan inovasi layanan publik.

23. **Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu APBN TA 2023.** Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.239,8 triliun serta Transfer ke Daerah Rp881,4 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp24,9 triliun atau 0,81 persen dibandingkan dengan TA 2022. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi optimalisasi peran APBN TA 2023 sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian, ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.
24. Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat Defisit Rp337,3 triliun atau 1,61 persen PDB yang jauh lebih rendah dari target APBN TA 2023, sebesar 2,27 persen PDB dan juga lebih kecil dibandingkan defisit 2022, yaitu 2,35 persen PDB. APBN TA 2023 juga mencatatkan surplus keseimbangan primer Rp102,59 triliun, merupakan surplus pertama kalinya sejak tahun 2012.
25. Realisasi Pembiayaan 2023 Rp356,7 triliun atau hanya 74,32 persen dari rencana dalam APBN yang sebesar Rp479,9 triliun. Realisasi Pembiayaan ini menurun Rp234,3 triliun atau 39,65 persen dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan 2022. Langkah penurunan defisit dan pembiayaan yang sangat signifikan, memperkuat posisi fiskal, dan nilai Surat Berharga Negara, sehingga *yield* suku bunga utang dapat ditekan dan *spread* terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat dijaga/diminimalkan, ditengah lonjakan suku bunga global yang luar

biasa (*high for longer*). Dengan defisit dan realisasi pembiayaan tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp19,4 triliun, menurun signifikan jika dibandingkan dengan SiLPA 2022 Rp130,6 triliun. Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal.

26. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dijelaskan bahwa SAL awal 2023, Rp478,9 triliun. Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp35,0 triliun. Setelah memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp459,5 triliun. SAL tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan APBN sebagai “*fiscal buffer*” atau “bantalan pengaman” yang efektif melindungi APBN dan perekonomian Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan, tekanan, dan ketidakpastian lingkungan global dan domestik pada tahun 2024.
27. Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam **Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp13.072,8 triliun, Kewajiban Rp9.536,7 triliun, dan Ekuitas Rp3.536,1 triliun**. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas.
28. Dalam **Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun**, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Di sisi lain, terdapat Surplus dari Kegiatan Non-

Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun. Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015.

**29. Laporan Arus Kas Tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2023.**

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp445,8 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp88,7 triliun. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama dalam rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

30. Pemerintah senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas secara konsisten, sebagaimana tercermin dari **keberhasilan Pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016**. Namun demikian, Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat nyata yang lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

31. Dalam **hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023, disampaikan 14 temuan** yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

negara di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain:

- a) **mengoordinasikan terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja** dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
- b) **senantiasa mendorong penyelesaian permasalahan di bidang perpajakan** melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk menghindari kesalahan pencatatan di masa yang akan datang.
- c) **melakukan evaluasi dan penyempurnaan implementasi *Automatic Blocking System***, mengakselerasi penagihan melalui langkah strategis dan melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBPN.
- d) **mengupayakan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pemantauan anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan**, baik terhadap pengalokasian dan realisasinya maupun atas ketercapaian *output* dan *outcome* dari pelaksanaan anggaran dibandingkan perencanaannya.
- e) **melanjutkan berbagai langkah mitigasi permasalahan belanja**, antara lain melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Forum Pelaksanaan Anggaran, dan Klinik Pelaksanaan Anggaran, untuk memastikan bahwa penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada K/L dilaksanakan sesuai ketentuan.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

32. Demikianlah pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023. **RUU ini kami ajukan untuk dilakukan pembahasan** dan selanjutnya kami mintakan persetujuan untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.

33. Semoga ketulusan, kerja keras, integritas, dan kerja sama yang baik, dapat menjadi modal kita untuk terus memberikan **upaya maksimal dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia**. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Terima kasih

Wallahul muwafiq ila aqwamithariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

**a.n. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI KEUANGAN**

**Ttd**

**SRI MULYANI INDRAWATI**